

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

---

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke- : 5
- Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020
- Waktu : 10.20 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Acara : Membahas:
1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2019;
  2. RKA K/L Tahun 2021;
  3. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI; dan
  4. Isu-isu Aktual Lainnya.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
- Sekretaris Rapat : Suparyanti, S.E. (Plt. Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 48 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
- B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
  2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
  3. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
  4. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
  5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

6. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL));
10. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
15. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
16. Ir. Nazir Foad, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut);
17. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
18. Ir. Agus Setya Prastawa, M.B.A. (Direktur Utama PT Inhutani I);
19. Ir. Sangudi Muhamad, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani II);
20. Ir. B. M. Setio Baskoro (Direktur Utama PT Inhutani III);
21. Ir. Andi Purwadi, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani IV); dan
22. Ir. Bakhrizal Bakri, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani V).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2019, RKA K/L Tahun 2021, Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dan Isu-isu Aktual Lainnya, dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2019 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 11a/LHP/XVII/05/2020. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menindaklanjuti semua temuan dan catatan BPK dalam rangka meningkatkan pengelolaan anggaran dan barang milik negara.
2. Komisi IV DPR RI menerima Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2019 per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

### **a. Laporan Realisasi Anggaran**

- 1) Realisasi Pendapatan Negara adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.992.073.615.963,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) atau mencapai 126% dari estimasi pendapatan LRA sebesar Rp4.775.356.680.000,00 (empat triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 2) Realisasi Belanja Negara, sebesar Rp8.843.040.517.179,00 (delapan triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar empat puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau mencapai 96% dari alokasi anggaran sebesar Rp9.196.117.308.000,00 (sembilan triliun seratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

### **b. Neraca**

- 1) Nilai Aset, sebesar Rp18.716.787.088.174,00 (delapan belas triliun tujuh ratus enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
  - a) Aset Lancar, sebesar Rp2.687.696.496.280,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam

juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

- b) Aset Tetap, sebesar Rp14.358.538.670.419,00 (empat belas triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah);
  - c) Piutang Jangka Panjang, sebesar Rp21.210.365.455,00 (dua puluh satu miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah); dan
  - d) Aset Lainnya, sebesar Rp1.649.341.556.020,00 (satu triliun enam ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu dua puluh rupiah).
- 2) Nilai Kewajiban dan Ekuitas, masing-masing sebesar Rp13.991.037.526,00 (tiga belas triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam rupiah) dan Rp18.702.796.050.648,00 (delapan belas triliun tujuh ratus dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

#### **c. Laporan Operasional**

- 1) Pendapatan-LO, sebesar Rp5.534.156.949.365,00. (lima triliun lima ratus tiga puluh empat miliar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah). Sedangkan jumlah beban sebesar Rp9.251.426.365.874,00 (sembilan triliun dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga terdapat defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp3.717.269.416.509,00 (tiga triliun tujuh ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu lima ratus sembilan rupiah);
- 2) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa, masing-masing sebesar defisit Rp30.656.929.290,00 (tiga puluh miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dan defisit Rp0,00 (nol);

sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp3.747.926.345.799,00 (tiga triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### **d. Laporan Perubahan Ekuitas**

Ekuitas entitas sebesar Rp18.702.796.050.648,00 (delapan belas triliun tujuh ratus dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar **Rp7.957.114.783.000,00** (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) TA. 2021 Menteri Keuangan Nomor: S-692/MK.02/2020 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan bersama dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan usulan penambahan Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 sebesar **Rp5.347.698.842.500,00** (lima triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
5. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp700.000.000.000,00** (tujuh ratus miliar rupiah), yang terdiri dari:
  - a. DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan
  - b. DAK Sub Bidang Kehutanan, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).
6. Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk melakukan pendalaman terkait:
  - a. program kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; serta
  - b. permasalahan perkebunan dan pertambangan ilegal di dalam kawasan hutan.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pelepasan kawasan hutan dan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta terus melakukan penertiban atas maraknya kegiatan perkebunan dan pertambangan ilegal di dalam kawasan hutan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan.

8. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga teknis terkait serta koordinasi dan pembinaan kepada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
9. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pembinaan dan memberikan dukungan kepada Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V sebagai Badan Usaha Milik Negara di Bidang Kehutanan, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dan mencari alternatif pemecahan permasalahan pengelolaan hutan, penyelesaian konflik kawasan hutan, serta pengembangan sistem multi usaha.
10. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus memprioritaskan pencapaian target Program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) seluas ±4,1 juta hektar dan Program Perhutanan Sosial seluas ±12,7 juta hektar yang menjadi program yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015.
11. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengalokasikan anggaran untuk Program Desa Wisata di sekitar kawasan hutan maupun IPAL Komunal, melalui mekanisme anggaran Pemerintah dan/atau untuk mendapatkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021.
12. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI (November 2019 s.d. Agustus 2020), baik kunjungan kerja pada masa reses maupun kunjungan kerja spesifik dalam bentuk tanggapan tertulis.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.50 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**

A-151

